

**SKRIPSI**

**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA  
PEREMPUAN DI INDONESIA**

**FATIMAH**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FATIMAH  
A011201002**



kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**  
**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**  
**PEREMPUAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**FATIMAH**  
**A011201002**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 06 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Agus Salim, SE., M.Si.  
NIP. 19670817199103 1 021

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19770913 200212 2 002



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

**FATIMAH**  
**A011201002**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 06 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1. 
2. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3. Prof. Dr. Nursini, SE., MA	Anggota	3. 
4. Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF	Anggota	4. 

  
 Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Universitas Hasanuddin  
  
 Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
 NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Fatimah**

NIM : **A011201002**

Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Determininan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
777ALX368965779  
**Fatimah**

NIM. A011201002

## PRAKATA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, dan anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi dengan judul “Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kawasan Timur Indonesia” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada Nabiullah Muhammad SAW.
2. Kedua orang tua saya yang telah banyak mendoakan, mendidik, dan membesarkan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang begitu besar. Kemudian, ketiga saudara saya Rajab, Tyara, dan Ainun yang telah memotivasi dan memberikan dukungan. Terima kasih telah menjadi keluarga yang berhasil membawa penulis hingga titik ini.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE. M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®, selaku pembimbing II, penulis sangat berterimakasih atas segala pemikiran, ide, bantuan, arahan, nasehat, kesabaran, dan waktu yang diluangkan selama proses hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen penguji Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., MA., dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE, M.Si., CPF., penulis mengucapkan banyak terimakasih atas saran dan kritik terhadap hasil penelitian sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran dan bantuan selama masa studi penulis.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan Perpustakaan *E-library* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bantuan dalam pengurusan berkas administrasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga ujian skripsi.
9. Saudara A. Nur Syahdi Eka Saputra yang senantiasa menemani, memberi semangat dan motivasi serta memberikan dukungan moral kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat terdekatku: Izry, Yayang, Alya, Ainun, Sharon, Raffy, Aninditha, Imam, Lala, dan Intan. Terima kasih telah menemani, memberi *support* dan selalu menghibur penulis selama berproses sebagai manusia.
11. Sahabat-sahabat kuliahku: Caca, Adeliën, Alisyah, Tiara, Shadiq, Ihsan, dan Fiqry. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama perkuliahan. Semoga pertemanan ini akan terus terjalin hingga kita semua sukses nantinya.
12. Teman-Teman KKN Tematik Gel. 110 Kelurahan Bontobontoa Posko 2. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan penyemangat dalam menjalankan KKN di Kelurahan Bontobontoa selama kurang lebih dua bulan. Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan penulisan skripsi ini dan senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan diberi balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya.

Makassar, 6 Agustus

2024

**FATIMAH**



**ABSTRAK**  
**DETERMINAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN  
DI INDONESIA**

Fatimah

Agussalim

Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia selama periode 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data-data tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menggunakan data 34 provinsi di Indonesia untuk kemudian dianalisis dengan metode Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Fixed Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia. Sementara secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh dan memiliki arah hubungan yang positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia. Sedangkan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Gender, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

**ABSTRACT**  
**DETERMINANTS OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN**  
**INDONESIA**

Fatimah

Agussalim

Retno Fitrianti

*This study aims to analyze the impact of the Gender Development Index (GDI), Provincial Minimum Wage (PMW), and Education Level on the Female Labor Force Participation Rate (FLFPR) in Indonesia from 2019 to 2023. This is a quantitative study using secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The data are tabulated into a panel data structure, which combines time series and cross-sectional data. The study uses data from 34 provinces in Indonesia, analyzed using the Fixed Effect approach in panel data regression analysis. Empirical results show that all determinant variables, including Gender Development Index (GDI), Provincial Minimum Wage (PMW), and Education Level, simultaneously influence the Female Labor Force Participation Rate (FLFPR) in Indonesia. On a partial basis, the Gender Development Index (GDI) and Education Level have a positive and significant effect on the Female Labor Force Participation Rate (FLFPR) in Indonesia. In contrast, the Provincial Minimum Wage (PMW) does not significantly impact the Female Labor Force Participation Rate (FLFPR) in Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Gender Development Index, Minimum Wage, Education Level, and Labor Force Participation Rate*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1.    Landasan Teori .....	11
2.1.1    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	11
2.1.2    Gender .....	14
2.1.3    Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	16
2.1.4    Upah Minimum .....	18
2.1.5    Tingkat Pendidikan .....	19
2.2.    Hubungan Antar Variabel .....	20
2.2.1    Hubungan Indeks Pembangunan Gender dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan .....	21
2.2.2    Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan .....	22
2.2.3    Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan .....	24
2.3.    Studi Empiris .....	24
2.4.    Kerangka Pikir Penelitian.....	29

2.5.	Hipotesis Penelitian .....	31
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	33
3.4	Metode Analisis Data.....	34
3.5	Model Estimasi Regresi Data Panel .....	35
3.5.1	<i>Common Effect Model</i> .....	35
3.5.2	<i>Fixed Effect Model</i> .....	35
3.5.3	<i>Random Effect Model</i> .....	35
3.6	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .....	36
3.7	Uji Asumsi Klasik .....	37
3.7.1	Uji Normalitas .....	37
3.7.2	Uji Multikolinearitas.....	38
3.7.3	Uji Heterokedastisitas .....	38
3.7.4	Uji Autokorelasi .....	39
3.8	Uji Hipotesis .....	39
3.9	Definisi Operasional .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Negara-Negara ASEAN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam persen).....	3
Tabel 4.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023 (Persen).....	42
Tabel 4. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia tahun 2019-2023 (Persen).....	44
Tabel 4.3 Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2019-2024 (Rupiah).....	46
Tabel 4. 4 Perkembangan Tingkat Pendidikan di Indonesia tahun 2019-2023 (Persen) .....	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow .....	50
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman .....	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas .....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	51
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Regresi .....	52

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian..... 31

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Penelitian.....	65
Lampiran 2 Hasil Transformasi Data.....	69
Lampiran 3 Common Effect Model (CEM) .....	74
Lampiran 4 Fixed Effect Model (FEM) .....	74
Lampiran 5 Random Effect Model (REM) .....	75
Lampiran 6 Uji Chow .....	75
Lampiran 7 Uji Hausman .....	76
Lampiran 8 Uji Multikolinearitas .....	76
Lampiran 9 Uji Heterokedasitisitas.....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya manusia merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas dan menguraikan prinsip-prinsip pendayagunaan tenaga kerja, kemampuan manusia mengolah sumber-sumber produksi serta ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri maupun masyarakat. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia meliputi: dinamika kependudukan, ketenagakerjaan, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan ketenagakerjaan, sektor informal-formal, transisi kependudukan, serta penduduk dan pembangunan ekonomi (Mulyadi S, 2008). Meningkatkan taraf hidup manusia adalah tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan disparitas ekonomi, juga dapat diatasi melalui upaya pembangunan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (Simanjuntak dan Payaman, 1998).

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan hasil dari partisipasi seluruh segmen masyarakat, termasuk peran aktif perempuan. Peningkatan kontribusi perempuan, terutama dalam aktivitas ekonomi, menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemajuan pembangunan suatu negara. Dalam tiga dekade terakhir, jumlah perempuan di seluruh dunia telah mencapai setengah dari total penduduk di hampir semua negara (World Bank, 2015). Dengan meningkatnya



partisipasi wanita dalam pembangunan maka akan mengurangi tingkat pengangguran wanita dan secara tidak langsung akan menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan pembangunan ekonomi nasional (Hardiani et al, 2017).

Selain dapat menjadi motor penggerak dan pendorong kemajuan suatu negara, partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan kunci untuk menuju keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Menurut Psacharopoulos dan Tzannatos (1989), Kontribusi perempuan dalam mengambil bagian dalam angkatan kerja akan menciptakan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perempuan yang terlibat dalam pasar kerja memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penghasilan yang diperoleh, sehingga membantu keluarga untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Septiawan & Wijaya, 2020).

Namun, pada kenyataannya, masih banyak orang yang berpendapat bahwa peran perempuan hanya sebatas dalam urusan mengelola rumah tangga. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perempuan semakin berani menjalankan peran transisinya dengan memasuki pasar tenaga kerja, didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Meski demikian, perempuan masih sering menghadapi kendala signifikan dalam mendapatkan pekerjaan dan mencapai kesetaraan perlakuan di dunia kerja (ILO, 2013). Adanya segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin menyebabkan perempuan harus menerima pekerjaan yang kurang produktif. Dampaknya adalah terbatasnya peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga tenaga kerja perempuan lebih banyak terfokus pada sektor informal, seperti bekerja di rumah atau terlibat dalam usaha mikro-kecil. Di negara berkembang seperti Indonesia, keterbatasan akses tenaga kerja perempuan terutama

terlihat dalam sektor formal (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

Salah satu kawasan yang terus memantau perkembangan peran perempuan dalam pasar tenaga kerja adalah negara-negara ASEAN. Dengan adanya keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja maka dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki perekonomian rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan individu, dan menyalurkan potensi bekerja kaum perempuan. Selain itu, dengan meningkatnya tenaga kerja perempuan maka akan mengurangi kemiskinan (Besamusca et al., 2015). Perkembangan tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan di ASEAN dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dapat disebut sebagai ukuran proporsional dari populasi usia kerja suatu negara yang dapat aktif di pasar kerja, baik bekerja maupun sedang mencari kerja. Sederhananya, TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dengan demikian, TPAK perempuan adalah proporsi angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan dalam usia kerja (Kemenpppa, 2019).

**Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Negara-Negara ASEAN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam persen)**

Negara	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
	Laki-Laki	Perempuan
Kamboja	85,9	74
Indonesia	81,5	53,7
Vietnam	79,4	69,6
Laos	78,1	74,8
Malaysia	77,6	51,2
Thailand	75	59
Singapura	76,8	59,4
Brunei Darussalam	72,3	54,4
Timor Leste	72,2	61

Myanmar	70	41
Filipina	68,3	43,8

*Sumber: World Bank*

Pada **tabel 1.1** menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan di negara-negara ASEAN. Salah satu negara yang memiliki ketimpangan rendah antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan adalah Laos. Angkatan kerja laki-laki mencapai 78,1 persen dari total populasinya dan perempuan 74,8 persen. Selanjutnya Vietnam dengan angkatan kerja laki-laki sebesar 79,4 persen dan perempuan 69,6 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia adalah 53,7 persen sementara laki-laki 81,7 persen pada tahun 2021. Angka tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketimpangan yang tinggi antara partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Saat ini Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan keempat di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia mengindikasikan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2023 mencapai 280,73 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,61 juta jiwa dibanding total penduduk pada Juni 2023. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia tahun 2023 sebesar 141,67 juta jiwa dan perempuan 139,05 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Tetapi, saat ini di Indonesia banyak perempuan yang memutuskan

masuk ke pasar kerja namun tingkat partisipasinya masih tetap rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki.

**Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2019-2023 (dalam persen)**

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
	Laki-Laki	Perempuan
2019	83,13	51,89
2020	82,41	53,13
2021	82,27	53,34
2022	83,87	53,41
2023	84,26	54,52

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Pada **Tabel 1.2** menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan di Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Selama periode tersebut TPAK laki-laki mengalami fluktuasi tetapi tidak signifikan sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, dari data tersebut bisa dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang sangat besar antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dengan perempuan. Pada dasarnya angka tersebut tidak mengalami banyak perubahan dalam 10 tahun terakhir. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh kurangnya informasi, anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga, adanya diskriminasi gender dan biaya yang tinggi (Kemenpppa, 2019).

Ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja tercermin dari masih tertinggalnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau persentase yang menunjukkan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kondisi ini menunjukkan peluang usaha perempuan untuk bekerja dan berusaha jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Kemenpppa, 2016).

Ketidaksetaraan gender dalam mengakses pasar tenaga kerja terlihat dari data yang ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara TPAK laki laki dan perempuan. Situasi ini mencerminkan bahwa peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki (Kemenpppa, 2016). Permasalahan perempuan dan isu ketimpangan gender sebenarnya merupakan hasil dari stigma masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang cocok dan wajar dikerjakan oleh perempuan. Perempuan identik dengan sektor domestik atau yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah tangga, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan sebagainya. Dengan adanya anggapan tersebut maka perempuan memiliki akses yang terbatas ke sumber daya, seperti pendidikan, pelatihan, kontak sosial, layanan pemerintah, dan permodalan (Kemenpppa, 2016). Stigma masyarakat umum tersebut didasari karena adanya faktor budaya termasuk pada nilai-nilai agamis yang masih menganggap bahwa wanita tidak perlu bekerja dan cukup menjadi ibu rumah tangga yang baik. Hal tersebut yang membuat belum adanya kesetaraan gender di Indonesia, perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan (Kemenpppa, 2020).

Kesetaraan gender merupakan hal yang patut untuk diperhatikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan dan hak yang sama khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender dapat diwujudkan apabila tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kehidupan sosial antara laki-laki dengan perempuan harus sama, seimbang, dan harmonis (Diana, 2018). Kesetaraan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki

dengan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur dengan kualitas dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, kesehatan menggunakan umur harapan hidup, dan ekonomi

Menurut Mankiw (2012) dalam sepuluh prinsip ekonomi, prinsip ketiga menyatakan bahwa manusia cenderung berpikir secara rasional terkait nilai tambah. Jika suatu tambahan memberikan manfaat bagi individu, maka individu tersebut akan berupaya maksimal untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Peningkatan upah minimum dapat berfungsi sebagai pemicu bagi anggota populasi usia kerja untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja.

Upah dalam teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga kerja (Sukirno, 2005). Upah atau pendapatan sangat berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Rini (2002 dalam Herlina, 2016) mengemukakan hal serupa yaitu faktor ekonomi umumnya mempengaruhi seorang wanita bekerja karena dengan mendapatkan penghasilan maka wanita dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan demikian tingkat upah berpengaruh positif terhadap partisipasi kerja wanita karena jika tingkat upah yang dibayarkan tinggi maka partisipasi tenaga kerja wanita akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori penawaran tenaga kerja wanita (*labor supply of women*) yang menjelaskan bahwa perubahan tingkat upah menjadi kunci yang menentukan apakah individu (termasuk perempuan) memilih masuk atau keluar dari pasar tenaga kerja (Borjas, 2013).

Selain itu, tingkat pendidikan juga merupakan hal yang penting untuk TPAK wanita, dijelaskan bahwa diskriminasi perempuan dalam pendidikan selain dapat menghambat pendidikan juga memperbesar ketimpangan sosial. Artinya penting

untuk tidak melakukan diskriminasi di bidang pendidikan terutama untuk kaum wanita (Todaro & Smith, 2011). Tingkat pendidikan wanita akan berpengaruh terhadap partisipasi wanita dalam pasar kerja. Semakin lama seorang wanita menempuh pendidikan atau semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja akan meningkat pula. Wanita dengan pendidikan SMP atau menempuh pendidikan selama 7 tahun memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja wanita paling rendah (Pratomo, 2017). Sedangkan wanita dengan pendidikan SMA umum cenderung tidak berpartisipasi dalam pasar kerja apabila dibandingkan dengan wanita yang berpendidikan dibawah SD. Hal ini dikarenakan wanita dengan pendidikan SMA umum melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat juga dikarenakan oleh ketidakmampuan dalam bersaing dipasar kerja dibandingkan dengan lulusan SMA kejuruan maupun lulusan perguruan tinggi atau diploma. (Ariani et al., 2014).

Dengan masih adanya kesenjangan gender yang dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan maka perlu direspon melalui langkah dan tindakan konkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberikan kontribusi lebih pada pembangunan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menjadi hal penting untuk dianalisis karena diyakini TPAK perempuan dapat menjadi penggerak atau merupakan hasil dari pembangunan ekonomi (Rogayah, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Gender berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan evaluasi untuk merumuskan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia.



## 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan literatur serta dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) khususnya variabel yang mempengaruhinya seperti Gender, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang benar-benar melakukan kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (Kusumowidho, 2010). Angkatan kerja adalah seluruh penduduk baik laki-laki maupun wanita yang termasuk dalam usia kerja (15 tahun atau lebih) (BPS, 2013). Tenaga kerja perempuan merujuk pada bagian dari sumber daya manusia perempuan yang aktif terlibat dalam kegiatan produktif, seperti pembuatan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merujuk pada sekelompok penduduk tertentu yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dan jumlah populasi usia kerja dalam kelompok yang sama (Schaner & Das, 2016). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menyimpulkan bahwa semua pendapat usia kerja juga dapat dinyatakan dalam bentuk kelompok tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok perempuan di kota, kelompok angkatan kerja terdidik, kelompok usia 10-14 tahun di desa dan sebagainya (Anifatul et al., 2022).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengestimasi seberapa besar tingkat keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi. Septiawan dan Wijaya (2020) menjelaskan bahwa angka TPAK dapat digunakan untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan (menganggur). Semakin meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja akan menyebabkan peningkatan jumlah anggota angkatan kerja dalam kelompok yang

sama. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga meningkat, maka jumlah mereka yang tidak termasuk dalam angkatan kerja akan bertambah, mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut merupakan rumus perhitungan TPAK menurut Badan Pusat Statistik, yaitu:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$$

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja (Setyowati, 2009).

Ehrenberg, R. G. & Smith (2012) menjelaskan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai rasio antara angkatan kerja dan populasi usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan persentase individu usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang masih sekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang masih bersekolah, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Jumlah penduduk yang masih bersekolah dipengaruhi oleh tingkat penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga. Dengan

kata lain, penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi keluarga secara tidak langsung mempengaruhi TPAK.

2. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

3. Umur

Penduduk berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan oleh sebab itu TPAK relatif besar. Lebih lanjut penduduk di atas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

4. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat.

5. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi kualitas atau jenjang pendidikan individu, maka akan membuat kesempatan bekerja semakin luas. Sehingga pada akhirnya TPAK akan mengalami kenaikan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencerminkan seberapa besar sumber daya tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Peningkatan TPAK perempuan sejalan dengan peningkatan pasokan tenaga kerja perempuan. Partisipasi tenaga kerja perempuan di pasar kerja mencerminkan aktifitas dan peran

perempuan dalam kegiatan perekonomian. Beberapa karakteristik yang diduga mempengaruhi TPAK perempuan melibatkan tingkat pendidikan perempuan, upah tenaga kerja perempuan, penduduk yang mengurus rumah tangga, tenaga kerja di sektor industri pengolahan, tenaga kerja di sektor pertanian, dan kondisi ekonomi. Secara matematis, perhitungan TPAK perempuan dilakukan dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan oleh jumlah penduduk perempuan usia kerja, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 (Septiawan & Wijaya, 2020).

Partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosio-demografi, ekonomi dan budaya (Widarti, 1998). Terdapat tiga kondisi perempuan memasuki pasar tenaga kerja, yaitu kondisi yang memungkinkan (*enabling condition*), seperti jumlah dan usia anak, kondisi yang memfasilitasi (*facilitating condition*), seperti pendidikan atau pelatihan, pengalaman kerja, dan kondisi pasar tenaga kerja lokal, serta kondisi yang mencetuskan (*precipitating condition*), seperti ketidakpuasan terhadap penghasilan keluarga dan ketidakpuasan personal (Audrey et al., 2019).

### **2.1.2 Gender**

Menurut World Health Organization (WHO), gender merupakan seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan. Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan dengan perempuan maupun laki-laki. Seperti dalam hal ras, suku, maupun kelas. Gender merupakan kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran serta seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender sangat beragam antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Menurut Sulistyowati (2016), gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap

perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis.

Salah satu teori gender yang membahas tentang wanita bekerja adalah teori feminisme liberal. Dimana teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun teori ini menolak persamaan laki-laki dan perempuan secara menyeluruh. Masih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan salah satunya adalah organ reproduksi. Teori ini menghendaki adanya kebebasan untuk perempuan berpartisipasi dalam berbagai bidang salah satunya bekerja di luar rumah, dengan begitu tidak akan ada kelompok gender yang lebih unggul (Marzuki, 2007).

Kesetaraan gender dapat terjadi apabila adanya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Laki-laki dan perempuan harus mendapat perlakuan yang sama dan tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda (Sulistiyowati, 2021).

Ketimpangan gender sudah menjadi topik utama dalam masalah pembangunan di berbagai negara, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang. Gender dapat diartikan sebagai ketidaksamaan peran, kedudukan dan sifat pada laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural. Gender dapat menjadi faktor sosial dalam menganalisis adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam peran, tanggung jawab, kesempatan, dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan mengalami ketimpangan gender, yaitu adanya budaya patriarki yang mendominasi di dalam masyarakat, faktor politik

yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, dan faktor ekonomi yang masih banyak mengeksploitasi kaum perempuan.

Dalam upaya menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan maka topik tentang kesetaraan gender ini menjadi satu poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Masalah tentang gender ini berada di poin ke 5 yang isinya menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi gender di dunia, agar kehidupan semakin damai (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dalam mengevaluasi pemberdayaan gender dalam pembangunan maka digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan yang dilihat melalui kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender dapat diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu presentasi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi, dan teknisi (Kemenpppa, 2020).

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan parameter yang mengukur pencapaian dasar pembangunan manusia dengan mempertimbangkan kesetaraan

gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada dasarnya adalah indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM, seperti umur panjang dan hidup sehat (*a long healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Hal yang membedakan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah dari segi upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menganalisis dengan menggunakan ratio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin sehingga hasil Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkisar antara 0-100 (Kemenpppa, 2020).

Pada tahun 1995, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), lima tahun setelah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya, IPG tidak secara langsung mengukur ketidaksetaraan gender, melainkan hanya menghitung disparitas dari setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk masing-masing jenis kelamin. Selain itu, nilai IPG tidak dapat diartikan secara terpisah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kemenpppa, 2014).

Pada tahun 2014, UNDP memperkenalkan pendekatan baru dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Perubahan ini sejalan dengan penyesuaian metodologi yang telah terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain sebagai penyempurnaan terhadap metode sebelumnya, IPG dengan pendekatan baru ini langsung mengukur ketidaksetaraan antara jenis kelamin dalam mencapai IPM. Dalam metode baru ini, digunakan rasio IPM perempuan terhadap IPM



laki-laki untuk menyoroti pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki (Kemenpppa, 2014).

Dalam perhitungan dengan metode yang baru ini masih menggunakan dimensi yang sama dengan perhitungan metode sebelumnya yaitu menggunakan umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Akan tetapi, pada tahun 2014 UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan dengan menambahkan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah pada dimensi pengetahuan dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita untuk mengukur dimensi standar hidup layak (Kemenpppa, 2014).

#### **2.1.4 Upah Minimum**

Upah minimum adalah suatu upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral, maupun sub sektoral. Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup dari pekerja secara minimal yaitu untuk sandang, pangan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan adanya kebijakan upah minimum ini maka pemerintah berharap pendapatan perkapita dari penduduk meningkat. Meningkatkan upah memang dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, berdasarkan teori klasik yang menyatakan bahwa upah yang semakin tinggi akan membuat pertumbuhan penduduk meningkat dan permintaan akan makanan menjadi naik sehingga produsen akan menambah produksinya yaitu dengan menambah tenaga kerja sebagai pengelola produksi yang dihasilkan (Jhingan, 2012:111). Adapun 3 komponen upah minimum (Sumarsono, 2001:98) :

1. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) adalah kebutuhan seseorang yang diperlukan untuk membuat kondisi fisik dan mentalnya dalam kondisi baik dan dapat melakukan proses produksi.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu ukuran yang dapat melihat naik turunnya kebutuhan hidup dan juga dapat digunakan untuk melihat kondisi inflasi. IHK dinyatakan dalam bentuk persen dan dihitung setiap bulan dan tahun.
3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan salah satu komponen dari pembentukan upah minimum disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kondisi perekonomian disuatu daerah.

Teori upah klasik mengatakan bahwa kenaikan upah akan menaikkan jumlah penduduk, sehingga permintaan akan kebutuhan hidup akan meningkat pula sehingga produsen akan menambah tenaga kerjanya untuk memenuhi permintaan terhadap produknya. Menurut teori permintaan tenaga kerja kenaikan upah yang dibebankan pada konsumen atau menaikkan harga produk akan menyebabkan berkurangnya permintaan yang kemudian akan membuat perusahaan menurunkan tingkat produksinya sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja. Sedangkan menurut teori penawaran tenaga kerja kenaikan upah akan menambah penawaran akan tenaga kerja.

Kenaikan tingkat upah dapat mempengaruhi penyediaan tenaga kerja dengan dua cara yang berbeda. Kenaikan pada tingkat upah akan membuat pendapatan meningkat (*income effect*) dan akan membuat tingkat partisipasi angkatan kerja berkurang. Tetapi disisi lain peningkatan upah akan membuat harga waktu menjadi relatif mahal, sehingga pekerjaan semakin menarik sehingga akan banyak tenaga kerja yang mau untuk menggantikan waktu senggangnya (*substitution effect*) untuk bekerja (Simanjuntak, 1998).

#### **2.1.5 Tingkat Pendidikan**

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Keberhasilan pembangunan

suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi produktivitas suatu negara (Atmanti, 2005). SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (Kemenpppa, 2016)

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu usaha dalam mengubah sifat dan tingkah laku seseorang untuk mencapai kedewasaan melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sarana paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada tingkat pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas untuk terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan juga dipandang sebagai suatu komponen pertumbuhan dan pembangunan yang penting sebagai input dari fungsi produksi agregat. Maka dari itu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2011).

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel independen (Indeks Pembangunan Gender (IPG), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan) di Kawasan Timur Indonesia.

### **2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Gender dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) memberikan gambaran tentang sejauh mana kualitas pembangunan manusia dengan fokus pada kesetaraan gender. Partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi indikator penentu tingkat pembangunan gender dalam suatu daerah. Dengan menggunakan metode yang disepakati oleh United Nation Development Programme (UNDP), angka 100 dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kemajuan pembangunan gender apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Semakin mendekati angka 100 menunjukkan pembangunan gender mengalami peningkatan, sebaliknya jika menjauhi angka 100 maka pembangunan gender mengalami penurunan.

IPG dapat diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan (Kemendiknas, 2014). Pendidikan yang dinilai dari rata-rata lama sekolah memiliki potensi untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Pendidikan menjadi elemen krusial dalam mencapai status pekerjaan, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat status pekerjaan yang dapat dicapai (Nadya & Syafri, 2019). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2016) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap partisipasi angkatan kerja

wanita. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pendidikan seseorang, nilai waktunya menjadi lebih mahal. Orang yang waktunya relatif mahal cenderung untuk menggantikan waktu senggangnya untuk bekerja (*substitution effect*). Pengaruh ini terutama lebih terlihat pada kalangan perempuan. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi umumnya tidak hanya tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, melainkan terlibat dalam pasar kerja. Oleh karena itu, proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja atau Tenaga Pekerja Aktif (TPAK) meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan (Simanjuntak, 2001).

Angka harapan hidup pada dasarnya mencerminkan kondisi kesehatan secara umum di suatu wilayah. Peningkatan angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena adanya peluang pekerjaan yang lebih besar di wilayah tersebut (Ginting, 2020).

### **2.2.2 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Salah satu elemen yang memengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja adalah besarnya upah yang ditawarkan. Ketika tingkat upah di pasar kerja meningkat, minat orang untuk bergabung dalam pasar tenaga kerja juga akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah rendah, individu yang berada dalam kelompok usia angkatan kerja mungkin tidak tertarik untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja. Mereka cenderung memilih untuk tidak bekerja atau memilih alternatif di luar angkatan kerja (Simanjuntak, 2001).

Tingkat upah yang terlalu tinggi dalam suatu masyarakat dapat mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja, tanpa adanya peningkatan yang sebanding dalam

lapangan pekerjaan. Situasi ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (Mankiw, 2000).

Peran upah tenaga kerja sangat signifikan dalam dunia ketenagakerjaan. Upah merupakan faktor kunci yang, bila dipertimbangkan dari perspektif penawaran tenaga kerja, berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro (2006), semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja (Ilham, 2016). Ketika tingkat upah tinggi, dapat menyebabkan peningkatan dalam kualitas tenaga kerja, sementara sebaliknya, bila tingkat upah yang ditawarkan rendah, dapat menyebabkan keberadaan tenaga kerja yang kurang terlatih (Michael, 2004). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardiani et al., (2020) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap TPAK Wanita.

Dalam paradigma ekonomi neoklasik, penawaran tenaga kerja akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat upah, sementara permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun ketika tingkat upah naik. Tingkat upah memiliki dampak signifikan pada tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana peningkatan tingkat upah di pasar tenaga kerja akan mendorong lebih banyak individu usia kerja untuk memilih terlibat dalam pasar tenaga kerja. Hal ini secara otomatis akan mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah mereka yang bukan angkatan kerja, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang disebabkan oleh kenaikan upah yang ditawarkan, kemungkinan terjadi peningkatan pengangguran terbuka. Fenomena ini terjadi ketika tingkat upah naik, menyebabkan lebih banyak penduduk usia kerja memasuki pasar tenaga kerja. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga jumlah angkatan kerja melebihi

permintaan tenaga kerja yang ada, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, di mana peningkatan tingkat upah dalam masyarakat akan mendorong lebih banyak anggota keluarga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja (Gianie, 2009).

### **2.2.3 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Semakin tingginya pendidikan seseorang, nilai waktunya semakin mahal. Orang dengan nilai waktu yang mahal akan menggantikan waktu senggangnya untuk bekerja (*substitution effect*). Pengaruh pendidikan ini terutama lebih berpengaruh nyata pada kaum wanita, dimana wanita dengan pendidikan tinggi tidak akan hanya tinggal dirumah untuk mengurus rumah tangga, tetapi juga masuk pasar kerja (Simanjuntak, 2001). Di era globalisasi sekarang ini kaum wanita memiliki kesempatan kerja yang sama dengan kaum laki – laki dalam menentukan keputusan mereka untuk bekerja. Dengan tingkat pendidikan kaum wanita yang tinggi menjadikan peluang mereka di pasar kerja menjadi setara dengan kaum laki – laki. Pendidikan yang dilihat dari pekerja dengan *primary education*, *secondary education*, dan *tertiary education* dan kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup merupakan suatu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (Nahar *et al.*, 2015).

## **2.3. Studi Empiris**

Anggi Septiawan dan Siti Haiyinah Wijaya (2020) melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2015-2019. Peneliti ini menggunakan metode analisis inferensia dengan model regresi data

panel. *Fixed effect model* (FEM) dengan metode *seemingly unrelated regression* (SUR) dipilih sebagai model terbaik untuk melakukan estimasi model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan, upah tenaga kerja perempuan, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dapat meningkatkan TPAK perempuan di Indonesia. Sementara itu, semakin tinggi jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dapat menurunkan TPAK perempuan di Indonesia.

Eni Setyowati (2009) melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja di Jawa Tengah periode tahun 1982-2000. Metode analisis yang digunakan adalah *Engle Granger Error Correction Models* (EG-ECM) yang didasari pada *granger representation theorem*. Hasil penelitian ini adalah variabel memiliki pengaruh dalam jangka pendek yaitu penduduk perempuan yang mengelola rumah tangga dan penduduk perempuan yang masih sekolah.

Muhammad Hidayat, Sutrisno dan Muhammad Fikry Hadi (2017) melakukan penelitian tentang TPAK perempuan antar kabupaten di Provinsi Riau yang menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel jumlah penduduk perempuan mengurus rumah tangga, jumlah penduduk usia sekolah memiliki berpengaruh negatif terhadap TPAK perempuan yang artinya dapat menurunkan TPAK, variabel pendidikan memiliki hubungan positif terhadap TPAK perempuan tetapi tidak secara signifikan terhadap TPAK perempuan, faktor yang dominan yang mempengaruhi TPAK perempuan antar Kabupaten di Provinsi Riau adalah jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Sardar Naeem Hakimzai (2022) melakukan penelitian tentang *Female Labor Force Participation* di Afghanistan yang menyoroiti beberapa faktor kunci yang



memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Faktor-faktor tersebut melibatkan pertumbuhan upah perempuan, keputusan untuk memasuki pasar kerja, tingkat pendidikan, serta dampak kekayaan dan memiliki anak kecil terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami ketidaksetaraan gender di pasar kerja Afghanistan, mengungkapkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pasar kerja, terutama sehubungan dengan peringkat Afghanistan dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender PBB dan pembatasan sejarah terhadap pekerjaan perempuan selama pemerintahan Taliban. Temuan penelitian ini berpengaruh pada kebijakan dan upaya advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja Afghanistan, terutama dalam mengatasi hambatan seperti peluang pendidikan, disparitas kekayaan, dan dukungan perawatan anak, serta menganjurkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Rahma Wahyuningtias (2019) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di pulau Jawa. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan data panel yaitu gabungan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Rumah Tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Variabel Upah Minimum Provinsi merupakan satu-satunya variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Rafly Parenta Bano dan John Tri Merjaya (2022) melakukan penelitian tentang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah data panel level provinsi tahun

2010-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, perempuan akan bekerja membantu mencari nafkah untuk menghindari situasi miskin. Partisipasi perempuan akan berhenti ketika pendapatan rumah tangga mencukupi, melebihi tingkat kritis atau *cut-off level* yang mengikuti kurva *backward blending supply*. Waktu untuk mengurus rumah tangga dari seorang perempuan akan meningkat karena tingkat pendapatan rumah tangga meningkat setelah *cut-off level*. Sebelum *cut-off level*, perempuan akan lebih cenderung memilih untuk bekerja. Ketika pendapatan rumah tangga tidak mencapai tingkat pendapatan kritis, maka perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja untuk memenuhi tingkat konsumsi subsisten dan setelah tingkat pendapatan mencapai tingkat konsumsi subsisten, perempuan mulai melakukan *trade-off* antara keluar dari pasar kerja dan terlibat dalam pekerjaan mengurus rumah tangga.

Maulidil Akmal dan Zulkifli (2017) melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di 4 negara Asia (China, Singapura, Indonesia, Korea Selatan). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di masing-masing Negara. Sedangkan untuk pengaruh parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita pada Negara China, Singapura, dan Indonesia. Sedangkan pada Negara Korea Selatan berpengaruh. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di masing-masing Negara.

Low Choon Wei and Loh Yunn Cinn (2021) meneliti tentang partisipasi angkatan kerja perempuan di Malaysia dengan menggunakan metode *Ordinary Least*

*Square regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penjelas yang dipilih (tingkat kesuburan, rasio ketergantungan usia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan perempuan, dan tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Malaysia) memiliki pengaruh yang besar terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan. Tingkat ketergantungan usia memiliki hubungan negatif, sebaliknya positif. Penelitian ini memiliki implikasi yang akan berpotensi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja perempuan.

Alfi Hakimatus Tsaniyah dan Lilik Sugiharti (2021) melakukan penelitian tentang partisipasi bekerja perempuan di Jawa Timur dengan menggunakan metode logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi bekerja perempuan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel umur, pendidikan SMP, pendidikan perguruan tinggi, status perkawinan belum kawin, status perkawinan cerai hidup, status perkawinan cerai mati, status kepala rumah tangga cerai mati, jumlah anggota rumah tangga, lokasi, dan pendapatan.

Siti Rogayah (2021) melakukan penelitian tentang TPAK perempuan dan Upah Riil di Indonesia dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel GLS-efek acak pada data Sakernas, Susenas, dan PDRB dalam kurun waktu 2002-2018 di 30 provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, peningkatan TPAKP di Indonesia ternyata menimbulkan efek negatif pada tingkat upah riil per jam, baik untuk pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Kedua, Ketika variabel independen PDRB per kapita dan rata-rata lama sekolah meningkat, upah riil per jam juga akan meningkat. Ketiga, dengan dilakukannya analisis inferensial pada tingkat provinsi, terbukti bahwa variasi antar provinsi tersebut besar yang artinya kondisi peningkatan TPAK di tiap provinsi di Indonesia cukup berbeda.

Salma Audiena Al Faizah, Winny Perwithosuci, Nur Hidayah, and Ali Zainal Abidin (2022) melakukan penelitian tentang tingkat melek huruf dan partisipasi angkatan kerja perempuan dengan metode analisis yang digunakan adalah data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat melek huruf perempuan yang tinggi juga memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang tinggi. Hasil ini membantu para ekonom dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi langkah-langkah untuk mengoptimalkan keputusan pasar tenaga kerja perempuan dan memberdayakan perempuan dengan meningkatkan tingkat melek huruf perempuan.

#### **2.4. Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pemikiran dalam penelitian Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) Indeks Pembangunan Gender, (2) Upah Minimum Provinsi, (3) Tingkat Pendidikan (4) Perempuan Mengurus Rumah Tangga. Variabel-variabel tersebut akan memberikan panduan kepada peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dengan tujuan mengatasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Kesetaraan gender dapat diukur melalui dua indikator yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan. IPG diukur melalui kualitas dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, kesehatan menggunakan umur harapan hidup, dan ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Kemenpppa, 2020). Kesetaraan gender cenderung meningkatkan kesehatan dan pendidikan perempuan. Peningkatan peranan perempuan dalam persediaan modal manusia secara positif

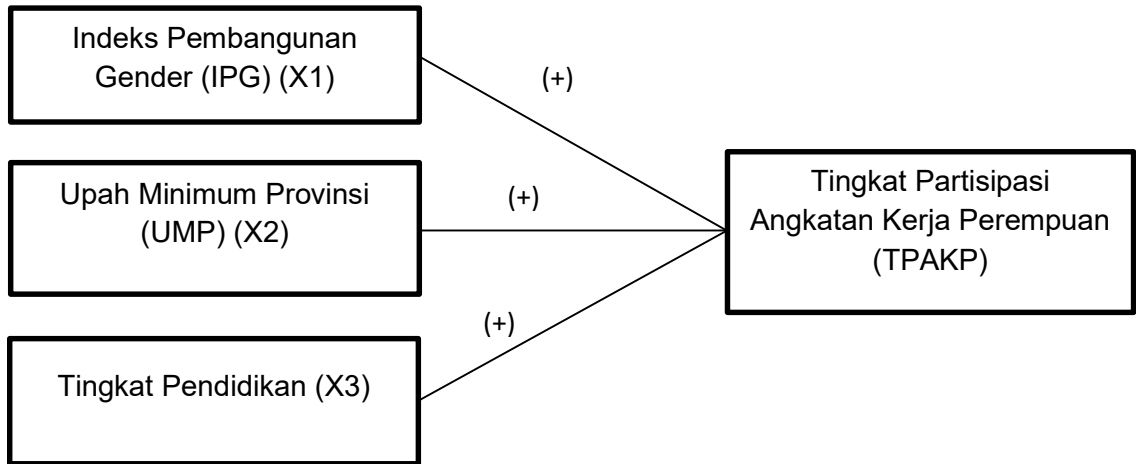
mempengaruhi pemberdayaan politik dan ekonomi penduduk perempuan sehingga perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Salah satu yang berdampak pada tingkat partisipasi dalam angkatan kerja adalah besarnya tingkat upah. Apabila tingkat upah yang ditawarkan di pasar kerja tinggi, maka minat orang untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah yang ditawarkan rendah, orang yang berada dalam usia angkatan kerja mungkin tidak tertarik untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja dan lebih memilih untuk tidak bekerja atau memilih bergabung dalam kelompok yang bukan angkatan kerja (Simanjuntak, 2001).

Selain itu, tingkat pendidikan juga merupakan hal yang penting untuk TPAK wanita, dijelaskan bahwa diskriminasi perempuan dalam pendidikan selain dapat menghambat pendidikan juga memperbesar ketimpangan sosial. Artinya penting untuk tidak melakukan diskriminasi di bidang pendidikan terutama untuk kaum wanita (Todaro & Smith, 2011). Tingkat pendidikan wanita akan berpengaruh terhadap partisipasi wanita dalam pasar kerja. Semakin lama seorang wanita menempuh pendidikan atau semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja akan meningkat pula (Pratomo, 2017).

Jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga memiliki pengaruh negative terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Sutrisno, dan Hadi (2017) yang menemukan bahwa semakin banyak penduduk yang mengurus rumah tangga dan penduduk yang bersekolah maka TPAK perempuan akan semakin kecil. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septiawan dan Wijaya (2020) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga maka akan menurunkan TPAK perempuan di Indonesia.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, **Gambar 2.1** dibawah adalah kerangka pikir yang berfungsi sebagai acuan untuk mencerminkan pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan hipotesis sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian**

Pada **Gambar 2.1** menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia.

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan tersebut, diduga bahwa:

1. Indeks Pembangunan Gender (X1) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Upah Minimum Provinsi (X2) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.
3. Tingkat Pendidikan (X3) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia tahun 2019-2023.

